

BAB III

PEMBAHASAN

Pada bab ini akan berisi penyajian data dan analisis data tentang Strategi Pemasaran Sosial Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Program Pemberdayaan Penggiat Anti Narkoba di Lingkungan Pendidikan tahun 2017. Peneliti memilih tahun 2017 karena pada tahun 2017 ini tahun pertama BNNP DIY menyelenggarakan program ini dan sebagai fasilitator untuk membentuk Penggiat Anti Narkoba dan Satuan Tugas Anti Narkoba di Lingkungan Pendidikan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang hanya melakukan kegiatan sosialisasi di Lingkungan Pendidikan.

Penyajian data dan analisis data pada bab ini disesuaikan dengan teori yang telah didapatkan di dalam kajian pustaka pada Bab I. Data yang diperoleh yaitu hasil wawancara lapangan dengan berbagai narasumber dari internal dan eksternal instansi, serta dokumentasi resmi dan pribadi.

A. PENYAJIAN DATA

Pada penyajian data ini seperti yang telah di paparkan di Bab I yang mana penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Penelitian ini akan mengambil data dari Badan Narkotika Nasional Provinsi D.I.Yogyakarta (BNNP DIY). Pembahasan ini akan dilakukan untuk bertujuan bagaimana strategi pemasaran sosial BNNP

DIY pada program Pemberdayaan Penggiat Anti Narkoba di Lingkungan Pendidikan tahun 2017.

Strategi pada hakikatnya adalah suatu perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai tujuan tertentu dalam praktik operasionalnya, sedangkan konsep Pemasaran Sosial adalah suatu penerapan teknik pemasaran komersial mulai dari analisis, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program untuk mempengaruhi perilaku yang disadari oleh khalayak dan yang berhubungan dengan kepedulian kemasyarakatan, kesejahteraan rakyat dan pelayanan sosial.

Program Badan Narkotika Nasional DIY dalam melakukan pemberdayaan penggiat anti narkoba merupakan produk sosial yang menjual gagasan untuk mendapatkan keuntungan dalam bentuk perubahan ide-ide ataupun pemikiran untuk menjadi yang lebih baik, dalam hal ini berupa cara pandang mengenai program tersebut. Perubahan yang ingin diperoleh dari program yaitu suatu tindakan yang mengarahkan masyarakat untuk menjadi penggiat anti narkoba untuk masyarakat agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba, sehingga membutuhkan suatu pemasaran sosial untuk memasarkan atau mengkampanyekan program. Dalam program BNNP DIY sendiri menggunakan kebijakan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) adalah upaya sistematis dari BNN untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam rangka penanganan narkoba yang meliputi aspek pencegahan, rehabilitasi dan pemberantasan.

Dalam pelaksanaan pemasaran sosial ada beberapa tahapan-tahapan. Tahapan ini guna mencapai komunikasi yang efektif terkait program dan kegiatan agar berjalan dengan baik. Berikut ini tahapan dalam melaksanakan pemasaran sosial:

1. Perencanaan Program Pemberdayaan Penggiat Anti Narkoba Badan Narkotika Nasional DIY

Mencermati perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba akhir-akhir ini, telah mencapai situasi yang mengkhawatirkan, sehingga menjadi persoalan kenegaraan yang mendesak. Korban penyalahgunaan Narkoba bukan hanya pada orang dewasa, mahasiswa tetapi juga pelajar SMA sampai pelajar setingkat SD. Para remaja menjadi salah satu kelompok yang rentan terhadap penyalahgunaan Narkoba.

Perencanaan suatu kegiatan/program merupakan hal yang penting dalam melakukan sebuah kegiatan/program untuk mencapai target yang sesuai dalam pelaksanaan program tersebut sehingga dalam pelaksanaan nanti dapat berhasil. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Bapak Aris Subagya sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, menjelaskan bahwa:

“Sebelum melakukan Program Pemberdayaan Penggiat Anti Narkoba di Lingkungan Pendidikan pada tahun 2017 ini kami melihat data penelitian yang telah dilakukan oleh BNN RI terlebih dahulu dan ternyata pada tahun 2016 D.I. Yogyakarta menempati peringkat pertama dalam tingkat nasional untuk yang coba-coba pakai narkoba. Setelah diteliti lebih dalam ternyata D.I. Yogyakarta merupakan tujuan utama para pelajar dan mahasiswa dari penjuru di Indonesia setiap tahunnya yang semakin meningkat untuk datang kesini untuk belajar. Wilayah yang khususnya tingkat kerawanan yang paling banyak yaitu kecamatan depok, karena

diantara wilayah yg lain kos-kosan, sekolah, kampus maupun tempat hiburan banyak terdapat di kecamatan depok, yang kedua maguwo, dan ketiga condongcatur.” (Wawancara tanggal 20 Maret 2018)

Analisis lingkungan sangat berpengaruh terhadap ketercapaian program pemberdayaan penggiat anti narkoba BNNP DIY, karena pemetaan segmentasi baik karakter, umur, kependudukan sangat menentukan dalam memetakan segmentasi program yang akan dilaksanakan. Dalam menganalisis lingkungan pemasaran sosial yang digunakan adalah menggunakan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*). Namun BNNP DIY tidak menggunakan analisis SWOT hanya saja analisis yang digunakan hampir mirip dengan analisis SWOT sehingga peneliti disini menyesuaikan data analisis yang digunakan BNNP DIY dengan memasukkan ke analisis SWOT.

a. *Strengths* (Kekuatan)

Untuk kekuatan itu sendiri dalam program pemberdayaan penggiat anti narkoba ini, BNNP DIY melakukan strategi kekuatan dengan menggunakan kebijakan Peraturan Daerah DIY No. 13 tahun 2010, karena dalam peraturan daerah tersebut terdapat mengenai wajibnya satuan pendidikan menyusun dan menetapkan mengenai kebijakan P4GN dalam peraturan dan tata tertib dan disosialisasikan di lingkungan pendidikan. Dalam peraturan daerah juga mewajibkan adanya Satuan Tugas Anti Narkoba di setiap Lingkungan Pendidikan.

b. *Weaknesses* (Kelemahan)

Kelemahan yang dihadapi BNNP DIY sendiri adalah sulitnya membuat kerjasama terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah ada di sekolah ataupun perguruan tinggi yang memerlukan prosedur yang panjang apalagi dalam membuat kegiatan atau program terbaru dalam suatu lingkungan pendidikan tersebut. Seperti pembentukan Satuan Tugas Anti Narkoba itu sendiri masih banyak lingkungan pendidikan yang belum membentuk karena prosedur kebijakan suatu sekolah atau perguruan tinggi yang sangat sulit dan lama.

c. *Opportunities* (Peluang)

Peluang yang bisa di dapatkan dari program pemberdayaan penggiat anti narkoba di lingkungan pendidikan yaitu banyaknya pelajar maupun mahasiswa sekarang yang sangat aktif berperan di organisasi ataupun masyarakat sehingga bisa menjadi peluang untuk mereka menjadi penggiat anti narkoba yang aktif apalagi dengan kemajuan teknologi dan media sosial sekarang yang semakin canggih yang bisa membuat para pelajar maupun mahasiswa bisa ikut menyuarakan gerakan anti narkoba itu sendiri di lingkungan sekitarnya.

d. *Threats* (Ancaman)

Ancaman yang harus di hadapi BNNP DIY dalam kegiatan di Lingkungan Pendidikan adalah pergantian siswa dan mahasiswa yang selalu terjadi setiap tahunnya di Yogyakarta apalagi yang dari luar wilayah Yogyakarta itu sendiri, sehingga memerlukan strategi dan

program jangka panjang supaya program tersebut bisa berkelanjutannya untuk Lingkungan Pendidikan.

Setelah menganalisis menggunakan analisis SWOT yaitu memilih khalayak sasaran. Adapun kriteria yang digunakan dalam melakukan pengklasifikasian target segmen dalam pemasaran sosial dapat dilakukan melalui pendekatan geografis, demografis dan psikografis menjelaskan sebagai berikut :

a. Segmen Geografis

Secara geografis kota D.I.Yogyakarta termasuk yang paling strategis dalam kerawanan penyalahgunaan narkoba, banyaknya pendatang yang datang dari luar daerah salah satu pemicu utama. Daerah yang tingkat kerawanan tertinggi di Yogyakarta adalah Kecamatan Depok, Sleman karena daerah ini terdapat sekolah dan perguruan tinggi paling banyak diantara daerah lainnya sehingga banyak anak kos atau pendatang baru yang datang. Kecamatan Depok juga terdekat dengan bandara Adisutjipto, pusat perbelanjaan dan hotel-hotel yang banyak dan juga kriminalitas di kabupaten Sleman termasuk tinggi di wilayah Yogyakarta.

b. Segmen Demografis

Untuk segmentasi demografis sendiri BNNP DIY menuju ke Lingkungan Pendidikan yaitu tingkat sekolah dan perguruan tinggi sesuai data 2016 dimana Yogyakarta termasuk kedalam pengguna coba-coba di peringkat pertama.

c. Segmen Psikografis

Sedangkan untuk segmen psikografis sendiri menasar ke generasi muda sekarang karena generasi muda sekarang memiliki sifat aktif, energik, selalu ingin tahu dan juga mudah terpengaruh dengan hal yang baru.

Dalam pemasaran sosial kita harus memiliki bauran pemasaran terlebih dahulu untuk membuat konsep program pemasaran sosial, agar produk tersebut bisa dipasarkan dengan baik. Bauran pemasaran sosial hampir mirip dengan pemasaran komersil pada umumnya, dalam pemasaran sosial produk atau barang yang dipasarkan tidak terlihat bentuk fisiknya berbeda dengan pemasaran komersil yang bentuk fisik dari produk dapat dilihat. Disini pemasaran sosial tidak berdiri sendiri melainkan mengadopsi konsep dari pemasaran komersil pada umumnya yaitu 4P (*product, price, place and promotion*) hanya saja dalam pemasaran sosial terdapat tambahan 2P yaitu (*partnership and policy*). Sesuai dengan konsepnya yaitu:

a. *Product* (Produk)

Salah satu bentuk produk dalam pemasaran sosial adalah produk sosial, produk sosial yang dilaksanakan dalam program pemasaran sosial antara lain berkaitan dengan: pertama, ide sosial (*social idea*) yang berhubungan dengan nilai-nilai (*value*), dan kepercayaan (*belief*), serta sikap tindak (*attitude*) atau norma-norma yang berlaku di masyarakat yang merupakan atau mempengaruhi tingkah pola atau

pandangan tertentu yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Dalam hal yg pertama ini berkaitan dengan “Indonesia Darurat Narkoba” yang mana ini sangat mempengaruhi masyarakat Indonesia untuk bisa bergerak menuju perubahan agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba sehingga perlu adanya ide sosial dan sikap tindak untuk menggerakkan gerakan anti narkoba.

Kedua adalah praktik sosial (*social practice*) yang berhubungan dengan tindakan dan perilaku (*act & behavior*). Untuk yang kedua berhubungan dengan sikap dan perilaku seperti gerakan “Stop Narkoba” .

Gambar 3.1 Gerakan Stop Narkoba



(Sumber: Dokumen Pribadi BNNP DIY)

Salah satu gerakan ciri khas BNN yang selalu di lakukan dengan 5 jari yaitu Stop Narkoba. Gerakan ini merupakan salah satu

bentuk dari kegiatan P4GN ini sendiri sehingga memudahkan dan mengingat dalam Gerakan Stop Narkoba.

Untuk yang terakhir adalah suatu objek nyata (*tangible object*), yang merupakan produk fisik dari produk-produk sosial. Seperti banner, pamflet, dan sticker yang berisikan gagasan mengenai narkoba ataupun slogan motivasi yang menarik. Tetapi harus dipahami bahwa produk utama bukanlah banner, pamflet, dan sticker, ini adalah alat untuk mencapai praktik sosial tersebut.

b. *Price* (Harga)

Dalam konteks pemasaran sosial ini harga atau biaya digunakan untuk merespon ide – ide baru dalam berperilaku dan nilai kepedulian untuk mendapatkan produk dari gagasan tersebut. Biaya atau harga dapat melibatkan pengorbanan yang berkaitan dengan kesejahteraan psikologis, emosional, sosial, ekonomi, waktu ataupun lainnya. Untuk harga ini dalam program pemberdayaan penggiat anti narkoba ini butuhnya meluangkan waktu dan inisiatif dari diri sendiri untuk ikut dalam mensosialisasikan atau mengkampanyekan gerakan anti narkoba ini karena untuk mendapatkan nilai kepedulian dalam suatu program butuh waktu yang panjang agar bisa terealisasi dengan baik.

c. *Place* (Tempat)

Di dalam pemasaran sosial, tempat yang menjadi saluran dalam menjual produk harus sesuai dengan produk apa yang akan dipasarkan

sehingga tempat yang dipilih menjadi tempat distribusi dapat berjalan efektif. Sesuai dengan penelitian yang dituju adalah Lingkungan Pendidikan jadi tempat produk yang akan distribusikan sesuai dengan target sasaran yaitu Lingkungan Sekolah dan Perguruan Tinggi yang menjadi tempat pemasaran produk pemasaran sosial tersebut.

d. *Promotion* (Promosi)

Kegiatan promosi ditujukan untuk mempengaruhi khalayak sasaran agar mereka dapat menjadi kenal akan produk yang ditawarkan. Untuk media promosi BNNP DIY tidak banyak menggunakan, mereka hanya menggunakan media seperti banner yang menarik dan berkerjasama dengan narasumber yang terpercaya untuk memberikan informasi mengenai program ini dan pentingnya kegiatan ini.

e. *Partnership* (Kemitraan)

Tujuan hubungan kemitraan adalah untuk mencari dukungan dalam proses pelaksanaan program pemasaran sosial itu sendiri. BNNP DIY berkerjasama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY, Dinas Pendidikan Sleman, BNNK Sleman dan Kopertis Wilayah V.

f. *Policy* (Kebijakan)

Kebijakan dalam program pemasaran sosial mengacu pada kebutuhan untuk menghadapi perubahan lingkungan dan kontekstual yang terjadi. Sehingga itu BNNP DIY menggunakan kebijakan P4GN yang merupakan tujuan utama dalam program pemasaran sosial ini

dan juga menggunakan kebijakan Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 13 Tahun 2010.

Beberapa rangkaian kegiatan selanjutnya yang berkaitan dengan perencanaan yaitu menjelaskan mengenai program yang akan di lakukan dan menentukan sekolah dan perguruan tinggi yang akan dilakukan Program Pemberdayaan Penggiat Anti Narkoba di Lingkungan Pendidikan ini. Pada perencanaan awal ini BNNP DIY melakukan Rapat Konsolidasi Kemandirian Lembaga Bidang P4GN bersama Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP DIY, Kasi Pemberdayaan Masyarakat BNNP DIY, Perwakilan Bidang SMA dan DIKTI Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga D.I.Yogyakarta, Dinas Pendidikan Sleman, Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNNK Sleman, Kopertis Wilayah V D.I. Yogyakarta, Perwakilan Kecamatan Depok dan Staf Pemberdayaan Masyarakat BNNP DIY. Rapat ini dilakukan pada tanggal 26 April 2017 bertempat di Ruang Pertemuan Kecamatan Depok.

Gambar 3.2 Rapat Konsolidasi Kemandirian Lembaga Bidang P4GN



(Sumber: Dokumen Pribadi BNNP DIY)

Rapat Konsolidasi Kemandirian Lembaga Bidang P4GN ini berformat diskusi antara peserta rapat untuk membahas rangkaian kegiatan di lingkungan pendidikan, menentukan sasaran peserta, serta membahas kebijakan yang bisa diimplementasikan di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi.

Dalam hal ini BNNP DIY memiliki sasaran peserta dalam rangkaian kegiatan pemberdayaan penggiat anti narkoba di lingkungan pendidikan ini yaitu:

- a. Setingkat SMA atau SMK dan Perguruan Tinggi (perbandingan 1:2).
- b. Instansi pendidikan yang belum memiliki satgas/aktivitas P4GN yang rutin.
- c. Instansi pendidikan yang memiliki potensi kerawanan terhadap penyalahgunaan narkoba.

- d. Instansi pendidikan yang dapat menjalankan kebijakan P4GN di lingkungannya.
- e. Instansi pendidikan yang berpotensi membentuk satuan tugas anti narkoba di lingkungannya.

Hasil dari kegiatan Rapat Konsolidasi Kemandirian Lembaga Bidang P4GN ini para peserta memilih beberapa sekolah dan perguruan tinggi yang telah diusulkan dari beberapa peserta rapat lainnya yaitu 15 sekolah yang dipilih adalah SMK Negeri 1 Depok, SMK Kesehatan Sadewa, SMK Diponegoro, SMK AAG Penerbangan Adisutjipto, SMA Negeri 1 Prambanan, SMA Negeri 1 Depok, SMA Negeri 1 Kalasan, SMA Kolombo Depok, SMA Gama Depok, SMA Budi Mulia 2, SMA Angkasa Adisutjipto, MA Wahid Hasyim, MA Negeri Maguwoharjo, MA Negeri 3 Sleman, MA Darussalam. 25 Perguruan Tinggi yang dipilih adalah Akademi Angkatan Udara, Akademi Keperawatan Panti Rapih, Akademi Komunikasi Indonesia, Akademi Komunikasi Radya Binatama, Akademi Pariwisata STIPARY, Poltekkes BSI, Poltekkes Permata Indonesia, Sekolah Tinggi Multi Media Nusantara, Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, STIA Kristen Maturia, STIE YKPN, STIKES Guna Bangsa, STIKES Wira Husada, STIKES Ahmad Yani, STMIC Akakom, Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto, STTN Batan, STTNAS, Universitas Atma Jaya, Universitas Islam Indonesia, Universitas Proklamasi45, Universitas Teknologi Yogyakarta, Universitas Respati Yogyakarta, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta.

15 Sekolah dan 25 Perguruan Tinggi yang telah dipilih tersebut nanti akan diundang pada acara kegiatan selanjutnya yaitu Rapat Kerja Pengembangan Kebijakan P4GN di Lingkungan Pendidikan. Nantinya peserta rapat adalah perwakilan wakil sekolah/guru yang membidangi kesiswaan dan wakil pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan.

Dalam menentukan target sasaran yang nanti akan dituju BNNP DIY melakukan kegiatan rapat lanjutan dari pertama yang mana untuk lebih jelas menentukan sekolah dan perguruan tinggi mana yang tingkat kerawannya mengkhawatirkan maka dilanjutkan dengan Rapat Kerja Pengembangan Kebijakan P4GN di Lingkungan Pendidikan, kegiatan ini dilakukan pada tanggal 16 Mei 2017 di Meeting Room Kaliurang, Hotel Merapi Merbabu, Seturan, Sleman, Yogyakarta.

“Rapat Kerja Pengembangan Kebijakan P4GN di Lingkungan Pendidikan ini BNNP DIY mengundang 25 kampus dan 15 sekolah yg mewakili yaitu wakil rektor bidang kemahasiswaan dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Disini tujuan kami untuk memberitahukan tentang adanya kebijakan Perda DIY No 13 tahun 2010 tentang adanya wajib satgas pada bidang pendidikan, dan juga kita memberitahukan akan ada rangkaian kegiatan pemberdayaan penggiat anti narkoba di lingkungan pendidikan pada tahun 2017. Didalam rapat ini kita menyebarkan kuesioner yang tujuannya untuk menyeleksi kembali menjadi 15 instansi pendidikan yang akan terpilih sekolah dan perguruan tinggi terkait dengan kerawanan dan juga kesediaan untuk menjalankan kegiatan P4GN dan mengundang dalam kegiatan pemberdayaan penggiat anti narkoba nantinya.” (Wawancara Ibu Adhika Pertiwi, 15 Januari 2018)

Jadi nanti pada rapat kerja pengembangan kebijakan P4GN di lingkungan pendidikan BNNP DIY mengundang 15 sekolah dan 25 perguruan tinggi yang nantinya akan dipilih lagi menjadi 6 sekolah dan 9

perguruan tinggi melalui kuesioner yang dibagikan kepada 15 sekolah dan 25 perguruan tinggi tersebut. Sebelum melakukan pengisian kuesioner tersebut BNNP DIY memberikan ilmu dan informasi mengenai kebijakan P4GN dan program yang akan dilakukan nanti.

Gambar 3.3 Rapat Kerja Pengembangan Kebijakan P4GN di Lingkungan Pendidikan



(Sumber: Dokumen Pribadi BNNP DIY)

Dalam rapat kerja pengembangan kebijakan P4GN di lingkungan pendidikan ini BNNP DIY juga memberikan materi dan narasumber untuk memberitahu informasi dari mengenai kebijakan Perda DIY No 13 tahun 2010, mengenai penyalahgunaan narkoba, jenis narkoba dan lainnya agar peserta yang mengikuti kegiatan ini paham mengenai P4GN. Lalu juga ada sesi diskusi dan tanya jawab.

Ada 3 narasumber yang dihadirkan di kegiatan rapat ini yaitu narasumber pertama yaitu dari Kepala BNNP DIY yaitu Drs. Mardi

Rukmianto, SH yang mana beliau menjelaskan mengenai tentang kondisi darurat pada lingkungan pendidikan di D.I.Yogyakarta yang memiliki kerawanan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang cukup tinggi dan juga dibuktikan dengan hasil penelitian BNN RI dan Puslitkes UI pada tahun 2016 yang mana sasaran survey penelitian tersebut tingkat pelajar dan mahasiswa.

Narasumber kedua yaitu dari Kepala Bidang P2M yaitu Bambang Wiryanto, S.Si memberikan materi mengenai potensi kerawanan narkoba di lingkungan pendidikan. Pada materi ini narasumber menjelaskan mengenai jenis narkoba dan dampaknya. Serta untuk mengantisipasi maraknya penyalahgunaan narkoba ke depan di DIY, BNNP berusaha untuk mengintensifkan upaya sosialisasi bahaya narkoba (*demand side*), meningkatkan upaya terapi dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba (*demand side*), dan meningkatkan efektifitas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (*supply side*).

Narasumber juga menyampaikan mengenai fakta empiris di lapangan terkait penanganan penyalahguna narkotika yang selama ini masih diperlakukan sama dengan pengedar, yaitu dihukum secara pidana. Hal tersebut menyebabkan korban yang awalnya hanya penyalahguna dihukum bersama dengan para pengedar tanpa ada upaya rehabilitasi sama sekali. Kemudian narasumber mengenalkan paradigma baru yang diusung oleh BNN, bahwa korban penyalahguna narkoba yang tidak terlibat dalam tindak pengedaran atau tindak kriminal lainnya, seharusnya diberi putusan

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Sehingga korban penyalahguna bisa dipulihkan dari kecanduan dan kembali ke masyarakat.

Potensi kerawanan narkoba dilingkungan pendidikan juga menjadi salah satu fokus pemaparan narasumber. Jika ada siswa atau mahasiswa di lingkungan pendidikan yang menjadi korban penyalahguna, sebaiknya dapat dilakukan pendekatan kepada siswa/mahasiswa tersebut untuk dapat melakukan rehabilitasi rawat jalan maupun rawat inap jika dibutuhkan. Sesuai dengan aturan Perda DIY No 13 Tahun 2010, bahwa instansi pendidikan harus memberikan waktu agar anak didiknya dapat melakukan rehabilitasi hingga tuntas. Selesai proses rehabilitasi instansi pendidikan dapat menerima anak didiknya untuk menuntaskan pendidikan seperti seharusnya.

Selanjutnya yang narasumber ketiga yaitu Gatot Sugiarto, SH., MH memberikan materi mengenai motivasi untuk kampus dan sekolah tentang pentingnya kebijakan P4GN di lingkungan pendidikan. Perwakilan dari tiap kampus dan sekolah adalah wakil pimpinan perguruan tinggi bidang kemahasiswaan dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Undangan tersebut ditargetkan kepada pemangku kebijakan di bidang kemahasiswaan/kesiswaan untuk dapat mensosialisasikan kewajiban pendidikan tinggi untuk mengembangkan kebijakan dibidang P4GN di lingkungannya masing-masing. Maka dari itu, narasumber memberikan beberapa poin materi mengenai alasan pentingnya dibuat kebijakan internal di lingkungan kampus dan sekolah terkait kegiatan-kegiatan P4GN sesuai

amanat Perda DIY No.13 Tahun 2010, memberikan contoh nyata kebijakan/implementasi P4GN yang sudah dilaksanakan oleh beberapa kampus dan sekolah, beberapa *action plan* yang bisa dilakukan kampus dan sekolah dalam melaksanakan gerakan anti narkoba di lingkungannya, dan motivasi agar para pemangku kebijakan wakil rektor dan wakil kepala sekolah bidang kemahasiswaan dan kesiswaan dapat merancang *action plan* di lingkungan pendidikan.

Setelah memberikan materi dari narasumber, BNNP DIY memberikan kuesioner untuk diisi oleh peserta rapat yang mengikuti. Tujuannya untuk menyebar kuesioner yaitu untuk menyeleksi kembali menjadi 15 instansi pendidikan yang akan terpilih terkait dengan kerawanan dan juga kesediaan untuk menjalankan kegiatan P4GN dan akan diundang dalam kegiatan pemberdayaan penggiat anti narkoba nantinya. Setelah kuesioner diisi pihak BNNP DIY melakukan pengecekan dan memilih diantara 15 sekolah dan 25 perguruan tinggi tersebut. Dari hasil yang telah di seleksi terdapatlah 15 instansi pendidikan yang akan mengikuti yaitu 6 sekolah dan 9 perguruan tinggi terdiri dari STTA Adisutjipto, STMIK AKAKOM, MAN 3 Sleman, STIKES Panti Rapih, UTY, STIKES Wira Husada, STTN BATAN, AKRB, SMK Penerbangan Adisutjipto, MAN 2 Sleman, SMA Angkasa Adisutjipto, STPN, Poltekkes Kemenkes Yogyakarta, SMK Negeri 1 Depok, dan SMA Negeri 1 Depok.

15 instansi pendidikan yang telah terpilih tersebut akan mengikuti rangkaian Program Pemberdayaan Penggiat Anti Narkoba di Lingkungan Pendidikan tahun 2017 ini.

2. Implementasi Program Pemasaran Sosial Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY pada Lingkungan Pendidikan

Dalam mengimplementasikan Program Pemberdayaan Penggiat Anti Narkoba di Lingkungan Pendidikan ini, BNNP DIY melakukan kegiatan di 15 instansi pendidikan dari Sekolah Menengah Atas atau Kejuruan dan Perguruan Tinggi.

Adapun *key message* yang ingin di sampaikan BNNP DIY dalam Program Pemberdayaan Penggiat Anti Narkoba di Lingkungan Pendidikan ini, untuk mendorong dan menggerakkan seluruh potensi masyarakat di lingkungan pendidikan untuk sadar dan peduli terhadap permasalahan narkoba dengan melakukan gerakan P4GN agar lingkungan pendidikan bersih dari permasalahan narkoba. Maka dari itu ada beberapa rangkaian kegiatan untuk implementasi program pemberdayaan penggiat anti narkoba ini.

Ada beberapa rangkaian kegiatan Pemberdayaan Penggiat Anti Narkoba di Lingkungan Pendidikan ini yaitu Pembinaan Fasilitator Pendidikan tentang Kebijakan P4GN di Bidang Pendidikan, Pelatihan Penggiat Anti Narkoba di Lingkungan Pendidikan dan Supervisi Hasil Implementasi Kebijakan di Bidang Pendidikan.

Pertama yang dilakukan BNNP DIY adalah Pembinaan Fasilitator Pendidikan Tentang Implementasi Kebijakan P4GN di Lingkungan Pendidikan dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2017 di meeting Room Grand Keisha, Condongcatur, Sleman, Yogyakarta.

Sasaran peserta kegiatan berjumlah 30 orang terdiri dari:

- a. Wakil rektor/ketua/pimpinan perguruan tinggi di bidang kemahasiswaan.
- b. Dosen calon pembimbing Satgas Anti Narkoba di lingkungan perguruan tinggi.
- c. Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan
- d. Guru calon pembimbing Satgas Anti Narkoba di lingkungan sekolah.

Gambar 3.4 Pembinaan Fasilitator Pendidikan Tentang Implementasi Kebijakan P4GN di Lingkungan Pendidikan



(Sumber: Dokumen Pribadi BNNP DIY)

Pada kegiatan pertama ini BNNP DIY juga menyediakan narasumber untuk memberikan materi kepada peserta yang mengikuti. Tujuan memberikan narasumber ini untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada pemangku kebijakan dan juga calon pembimbing satgas tentang narkoba dan permasalahan yang bisa ditemukan di sekolah maupun kampus dan peserta juga dapat membuat kebijakan tentang P4GN serta dapat membimbing Satuan Tugas Anti Narkoba yang akan terbentuk di lingkungan sekolah maupun kampus.

Narasumber pertama yaitu Kepala BNNP DIY yg baru Drs. Triwarno Atmojo memberikan materi mengenai potensi kerawanan narkoba di lingkungan pendidikan DIY menurut data BNN. kemudian narasumber juga menyampaikan tujuan kegiatan ini sebagai wujud BNN dalam merangkul fasilitator pendidikan untuk menciptakan gerakan P4GN di lingkungan perguruan tinggi dan sekolah. Narasumber berharap fasilitator dapat membantu mewujudkan kegiatan P4GN dengan dukungan dari *decision maker* di lingkungan perguruan tinggi maupun sekolah.

Narasumber kedua yaitu Erik Hadi Saputra, S.Kom., M. Eng memberikan materi mengenai motivasi bagi fasilitator pendidikan untuk mendukung gerakan P4GN di lingkungan perguruan tinggi dan sekolah. Narasumber memberikan narasumber memberikan beberapa poin materi mengenai alasan pentingnya dibuat kebijakan internal di lingkungan kampus dan sekolah terkait kegiatan-kegiatan P4GN sesuai amanat Perda DIY No. 13 Tahun 2010, memberikan contoh nyata

kebijakan/implementasi P4GN yang sudah dilaksanakan oleh beberapa kampus dan sekolah, beberapa *action plan* yang bisa dilakukan kampus dan sekolah dalam melaksanakan gerakan anti narkoba di lingkungannya, dan motivasi agar para pemangku kebijakan wakil rektor dan wakil kepala sekolah bidang kemahasiswaan dan kesiswaan dapat merancang *action plan* di lingkungan pendidikan. Narasumber juga memberikan motivasi agar para fasilitator pendidikan peduli dengan permasalahan kerawanan narkoba yang bisa saja menimpa anak didiknya. Sehingga para fasilitator pendidikan merasa tergugah dan terinspirasi untuk mendukung kegiatan P4GN yang akan dilakukan oleh siswa maupun mahasiswanya baik dukungan legalitas serta sarana prasarana kegiatan.

Narasumber ketiga yaitu Eko Prasetyo merupakan seorang praktisi rehabilitasi di Jogja Care House. Beliau memberikan materi mengenai penanganan rehabilitasi untuk adiksi narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa. Beliau memberikan informasi potensi kerawanan narkoba di lingkungan pendidikan juga menjadi salah satu fokus pemaparan narasumber. Jika ada siswa atau mahasiswa di lingkungan pendidikan yang menjadi korban penyalahguna, sebaiknya dapat dilakukan pendekatan kepada siswa maupun mahasiswa tersebut untuk dapat melakukan rehabilitasi rawat jalan maupun rawat inap jika dibutuhkan. Sesuai dengan aturan Perda DIY No. 13 Tahun 2010, bahwa instansi pendidikan harus memberikan waktu agar anak didiknya dapat melakukan rehabilitasi hingga tuntas. Selesai proses rehabilitasi, instansi pendidikan

dapat menerima anak didiknya untuk menuntaskan pendidikan seperti seharusnya. Narasumber juga memberikan penjelasan mengenai penanganan rehabilitasi pada adiksi narkoba yaitu penjelasan tentang jenis-jenis narkoba yang banyak beredar di Yogyakarta dan dampaknya, penjelasan tentang isu terbaru obat penenang dumolid (psikotropika), contoh kasus siswa/mahasiswa yang menyalahgunakan narkoba dan proses rehabilitasinya, proses rehabilitasi yang bisa diikuti oleh siswa maupun mahasiswa yang terlanjur menyalahgunakan narkoba dan juga bagaimana sikap instansi pendidikan seharusnya jika ada siswa ataupun mahasiswa yang menyalahgunakan narkoba.

Setelah penjelasan mengenai materi yang diberikan oleh para narasumber, pihak BNNP DIY memberikan informasi selanjutnya untuk kegiatan yang dilakukan oleh fasilitator pendidikan yaitu membuat dan menyusun *action plan* yang di jelaskan oleh Ketua Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bambang Wiryanto, S. Si.

Action plan atau rencana aksi adalah sebuah alat untuk membantu pelaksanaan program agar lebih terencana dan dapat dilakukan sesuai dengan kondisi yang ada. *Action plan* dibuat dengan tujuan untuuk mempermudah suatu kegiatan dalam mencapai target yang diharapkan. Sifatnya yang detail dan terukur, memungkinkan suatu kegiatan dapat selalu termonitor.

Action plan yang dibuat oleh BNNP DIY diharapkan dapat memenuhi kriteria SMARTTEST (*specific, measureable, attainable, realistic, time bounded, evaluated, significant, traceable*) dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. *Specific*: dalam pembuatan *action plan*, perlu dituliskan secara spesifik mengenai apa yang akan dilakukan pihak instansi pendidikan dalam program/kegiatan yang akan dilakukan mengenai P4GN.
- b. *Measurable*: *action plan* yang dibuat harus dapat diukur sehingga mudah dalam penentuan keberhasilannya. Agar dapat diukur, dapat diawali dengan analisa kondisi lingkungan untuk memahami posisi saat ini.
- c. *Attainable*: penetapan tujuan dalam program/kegiatan yang akan dilakukan nanti harus jelas dan bisa mencapai tujuan yang pasti.
- d. *Realistic*: program/kegiatan yang akan dilakukan harus benar-benar bersifat nyata atau yang benar-benar akan dilaksanakan kegiatan tersebut nantinya.
- e. *Time bounded*: waktu pelaksanaan program/kegiatan harus jelas.
- f. *Evaluated*: program/kegiatan yang dibuat dapat dievaluasi dan sudah disiapkan mekanisme pelaksanaan evaluasi baik di pra, kegiatan maupun pasca kegiatan.
- g. *Significant*: ini merupakan hal yang penting dalam pembuatan program/kegiatan karena dalam membuat tujuan target sasaran harus sesuai dan jelas sehingga bisa tersampaikan dengan baik.

h. *Traceable*: pembuatan kegiatan atau suatu program harus memiliki sifat yang mudah dilacak atau dikendalikan prosesnya. Hal ini dibutuhkan agar dalam pelaksanaan kegiatan nanti, kita tahu posisi kita sampai dimana dan apakah sudah sesuai dengan target yang ditetapkan atau belum.

Peneliti sempat mewawancarai peserta yang mengikuti kegiatan fasilitator pendidikan ini. Peneliti bertanya mengenai pendapat pada kegiatan fasilitator pendidikan yang dilakukan BNNP DIY.

“sebelum mengikuti kegiatan ini saya hanya mengetahui sedikit mengenai P4GN dan Satgas Anti Narkoba dari sekolah-sekolah yang sudah ada namun ingin membentuk Satgas Anti Narkoba itu sendiri belum bisa karena kurangnya bekal informasi untuk membentuk jadi sekolah hanya membuat kebijakan di tata tertib saja. Namun pada tahun 2017 kebetulan BNNP DIY membuat program ini dan mengundang kami, kami pun cukup senang. Setelah mengikuti kegiatan ini dan mendiskusikan lagi dengan pihak sekolah akhirnya dibentuklah Satgas Anti Narkoba di MAN 3 ini dan juga kami langsung membuat beberapa program kegiatan waktu itu.” (Wawancara Ibu Mutmainah MAN 3 Sleman Sebagai Pembimbing Satgas, 4 April 2018)

Setelah melakukan Pembinaan Fasilitator Pendidikan Tentang Implementasi Kebijakan P4GN di Lingkungan Pendidikan yang dihadiri oleh Wakil rektor/ketua/pimpinan perguruan tinggi di bidang kemahasiswaan, Dosen calon pembimbing Satgas Anti Narkoba di lingkungan perguruan tinggi, Wakil kepala sekolah bidang kesiswaan dan Guru calon pembimbing Satgas Anti Narkoba di lingkungan sekolah.

BNNP DIY selanjutnya melanjutkan Program Pemberdayaan Penggiat Anti Narkoba pada siswa dan mahasiswanya untuk menjalani pelatihan penggiat anti narkoba di lingkungan pendidikan dilaksanakan pada tanggal 18 September 2017 di Meeting Room Grand Tjokro, Condong Catur, Sleman, Yogyakarta. Kegiatan ini dihadiri sebanyak berjumlah 40 orang terdiri dari perwakilan calon penggiat dari pelajar 6 sekolah, perwakilan calon penggiat dari mahasiswa 9 perguruan tinggi dan perwakilan anggota satgas anti narkoba yang aktif dari perguruan tinggi di DIY.

Gambar 3.5 Pelatihan Penggiat Anti Narkoba di Lingkungan Pendidikan Pada 9 Perguruan Tinggi dan 6 Sekolah



(Sumber: Dokumen Pribadi BNNP DIY)

Sama seperti kegiatan sebelumnya para peserta diberikan narasumber, namun kali ini lebih terkhusus pada narasumber yang memberikan informasi bagaimana menjadi penyuluh atau penggiat anti narkoba dan juga akan ada simulasi bagaimana mengenai *public speaking*.

“Kegiatan yang dilakukan di Pelatihan Penggiat Anti Narkoba di Lingkungan Pendidikan itu dimulai pukul 7 pagi, pembukaan diawali oleh BNNP DIY selanjutnya yaitu pemberian materi mengenai narkoba dari jenis-jenis narkoba sampai dengan kasus-kasus yang terjadi pada remaja, apalagi ketika kasus Pil PCC yang sempat menghebohkan itu. Disana dijelaskan semuanya mengenai bahayanya dan lain-lain. Setelah pemberian materi mengenai narkoba sampai jam 12, lalu istirahat terlebih dahulu untuk makan dan sholat. Kemudian lanjut dengan materi *public speaking* disana kami diberi bekal mengenai *public speaking* dan simulasi untuk bagaimana *public speaking* yang baik dan benar.” (Wawancara Mega Wakil Ketua dari Forum Gerakan Bebas Narkoba (FGBN) Univeristas Teknologi Yogyakarta, 05 April 2018)

Narasumber yang dihadirkan yaitu Budi Prasetya, S. Si dari Lembaga Anak Bangsa Cerdas Yogyakarta. Ia memberikan materi mengenai teknik *public speaking* untuk penyuluhan. Narasumber menyampaikan mengenai pengertian komunikasi yaitu proses mengirim dan menerima pesan baik secara verbal maupun non verbal. Proses komunikasi tersebut bersifat dinamis dan dapat mempengaruhi orang lain. Untuk lebih memberikan pemahaman kepada peserta, narasumber melakukan simulasi permainan komunikasi beberapa kali. Percobaan pertama adalah simulasi komunikasi satu arah tanpa mengikutsertakan komunikasi non verbal dalam memecahkan suatu masalah. Percobaan kedua adalah simulasi komunikasi dua arah yang memperbolehkan peserta menggunakan bahasa-bahasa non verbal. Dari kedua simulasi tersebut,

percobaan terakhir sukses memberikan peserta pemahaman mengenai poin-poin penting dalam komunikasi agar pesan tersampaikan dengan baik. Selain itu, narasumber juga memaparkan mengenai ‘teknik 5 besar’ sebagai seorang penyuluh, yaitu harus memiliki semangat besar, mata besar, senyum besar, gerak besar, dan suara besar. Selain teknik 5 besar, dibutuhkan latihan, keberanian, serta penggunaan ekspresi dalam melakukan penyuluhan.

Narasumber menyampaikan teknik-teknik *public speaking* yang dapat digunakan untuk bekal mereka melakukan penyuluhan, antara lain:

- a. Cara untuk mengurangi perasaan demam panggung/*nervous*.
- b. Cara untuk menilai dan memahami *audience* yang akan dihadapi.
- c. Bagaimana cara untuk menarik perhatian *audience* agar fokus memperhatikan pengisi materi (dari sisi suara, penampilan, pengenalan diri).
- d. Cara berkomunikasi secara efektif dan efisien dengan menggunakan media/alat bantu yang tepat.
- e. Seni berbicara agar pesan yang disampaikan dapat diterima oleh *audience*.

Tujuan kegiatan pelatihan penggiat anti narkoba di lingkungan pendidikan ini diberikan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan untuk menciptakan penggiat anti narkoba. Nantinya, penggiat anti narkoba diharapkan dapat memiliki kemampuan untuk melakukan sosialisasi

gerakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) untuk lingkungan sekitarnya. Selain itu, diharapkan penggiat anti narkoba dapat membuat rencana aksi yang bisa dilaksanakan di lingkungan sekolah/ perguruan tinggi dengan dukungan dari fasilitator pendidikan yang telah diundang di acara sebelumnya. Beberapa rencana aksi yang bisa dilaksanakan adalah membuat satuan tugas anti narkoba, melakukan sosialisasi internal di lingkungan sekolah/ perguruan tinggi, dan membuat media sosial untuk kampanye anti narkoba.

Setelah melakukan kegiatan dengan fasilitator pendidikan dan pelatihan penggiat anti narkoba, BNNP DIY melanjutkan program pemberdayaan penggiat anti narkoba di sekolah dan perguruan tinggi yang telah di pilih tadi yaitu 6 sekolah dan 9 perguruan tinggi. Pada tahap ini BNNP DIY mengunjungi masing-masing sekolah dan perguruan tinggi kegiatan ini disebut dengan Supervisi Hasil Implementasi Kebijakan P4GN di Lingkungan Pendidikan Tahap 1 dari tanggal 9 Oktober sampai tanggal 25 Oktober 2017. Kunjungan supervisi pertama ini menjadi ajang diskusi mengenai rencana aksi (*action plan*) yang bisa dilakukan penggiat di lingkungan sekolah/kampus.

Peneliti mewawancarai beberapa peserta penggiat anti narkoba mengenai kegiatan dan rencana aksi yang dilakukan pihak sekolah dan perguruan tinggi setelah mengikuti kegiatan Program Pemberdayaan Penggiat Anti Narkoba yang dilakukan BNNP DIY. Peneliti

mewawancarai 4 informan yaitu Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto, Universitas Teknologi Yogyakarta, MAN 2 Sleman, dan MAN 3 Sleman.

a. Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto (STTA)

Informan: Junior, Ketua dari DENAKAA (Detasemen Anti Narkoba STTA)

“Disana kita mendapat pembekalan mengenai narkoba dan pembentukan Satgas Anti Narkoba, dari situ saya mengetahui kalo Satgas Anti Narkoba itu penting apalagi di kalangan generasi muda sekarang. Setelah kegiatan itu Wakil kemahasiswaan menyuruh untuk membentuk Satgas Anti Narkoba dan saya bersama teman saya yang mengikuti kegiatan membentuklah struktur dan membuat rekrutmen untuk anggota baru yang ingin bergabung dengan Satgas Anti Narkoba. Setelah itu keluar SK dari kampus dan terbentuklah DENAKAA (Detasemen Anti Narkoba STTA). Namun karena ini baru jadi kami belum bisa mendapatkan dana dari kampus untuk memulai kegiatan besar, sehingga jadi kami memulai kegiatan dari internal terlebih dahulu baru ke eksternal.” (Wawancara, 23 Maret 2018)

Rencana aksi atau kegiatan yang akan dilaksanakan selanjutnya oleh Satgas Anti Narkoba DENAKAA yaitu pelatihan internal terlebih dahulu agar anggota tau rencana kedepan untuk DENAKAA ini. Apalagi DENAKAA baru di dalam kegiatan satgas anti narkoba ini sehingga masih merintis untuk DENAKAA sendiri.

Adapun kegiatan Satuan Tugas Anti Narkoba DENAKAA ini mereka melakukan beberapa kegiatan setelah terbentuknya Satuan Tugas Anti Narkoba ini. Kegiatan pertama yang mereka lakukan adalah Sosialisasi Anti Narkoba kepada warga sekolah kampus pada saat penerimaan mahasiswa baru, disana para anggota DENAKAA

bekerjasama dengan BNN sebagai narasumber untuk memberikan materi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba kepada mahasiswa baru yang ada di STTA tersebut, tujuan diadakannya sosialisasi ini agar mahasiswa yang baru masuk dalam dunia perkuliahan ini mengerti dan tahu tentang pengetahuan tentang narkoba supaya tidak menyalah gunakan narkoba, materi yang digunakan dengan persentasi dan juga ada sesi tanya jawab.

Selanjutnya mereka melakukan Kampanye Anti Narkoba Melalui Media Sosial, tujuan kegiatan ini untuk memanfaatkan media sosial sekarang untuk selalu update mengenai informasi tentang kampanye anti narkoba dan juga membuat konten-konten yang menarik dan kekinian serta kata-kata motivasi Anti Narkoba apalagi media sosial sekarang sangat diminati generasi muda sekarang sehingga perlunya hal yang menarik untuk melakukan gerakan anti narkoba.

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti juga, Junior mengatakan

“Untuk saya sendiri gerakan anti narkoba bukan hanya dalam suatu kelompok saja yang harus diterapkan namun untuk lingkungan terdekat saya juga diterapkan seperti dengan teman dekat saya, misalnya saja saat ada teman saya merokok di lingkungan kampus, saya sebagai mahasiswa yang ada di lingkungan kampus yang mana kampus melarang adanya larangan merokok saya harus berani menegur teman saya tersebut karna menurut saya rokok menyebabkan kecanduan sehingga bisa saja itu menjadi awal mula narkoba karena saya pun juga pernah mendengar hal tersebut.” (Wawancara, 23 Maret 2018)

b. Universitas Teknologi Yogyakarta

Informan: Denni dan Mega, Ketua dan Wakil Ketua dari FGBN UTY
(Forum Gerakan Bebas Narkoba UTY)

Beberapa rencana aksi yang dilakukan oleh FGBN yaitu mereka melakukan Seminar Nasional dengan tema “Putuskan Rantai narkoba Selamatkan Generasi” disini mereka berkerjasama dengan BNNP DIY, RSJ Grhasia, GRANAT Yogyakarta sebagai narasumber di seminar nasional tersebut. Tujuan FGBN sendiri menyelenggarakan Seminar nasional ini untuk memberikan pengetahuan bukan hanya disekitar kampus UTY tapi dari luar kampus UTY juga karena seminar nasional ini juga terbuka untuk umum. Dalam seminar nasional ini kami juga ingin mengenalkan FGBN sendiri sehingga Satuan Tugas Anti Narkoba mulai bisa dikenal oleh seluruh masyarakat.

Dalam kegiatan seminar nasional yang dilakukan FGBN UTY ini memberikan pesan-pesan melalui narasumber yang diundang seperti BNNP DIY menyampaikan mengenai materi penyalahgunaan narkoba dan perkembangannya, RSJ Grhasia menyampaikan mengenai psikologi seseorang menjadi pecandu narkoba, GRANAT (Gerakan Nasional Anti Narkotika) disini menyampaikan mengenai gerakan dan motivasi yang dilakukan untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba. Dalam ketiga narasumber ini FGBN berharap peserta seminar terutama

generasi muda sekarang memahami bagaimana menjadi generasi yang lebih baik tanpa harus menggunakan narkoba.

c. MAN 2 Sleman

Informan: Ibu Yeni, Pembimbing SANTINA (Satgas Anti Narkoba MAN 2 Sleman)

SANTINA sendiri sudah berdiri sebelum kegiatan pemberdayaan penggiat anti narkoba yang di lakukan BNNP DIY. Adapun beberapa rencana aksi yang akan dilakukan SANTINA ini yaitu pertama Sosialisasi Anti Narkoba dengan warga sekolah, disini mereka melakukan kegiatan diawal semester baru. Pada sosialisasi kali ini SANTINA menyediakan materi ppt yang disampaikan oleh penggiat di SANTINA itu sendiri dan juga memutar video-video agar tidak bosan hanya dengan materi saja dan disini juga menyediakan sesi tanya jawab, materi yang digunakan pun masih seputaran bahaya penyalahgunaan narkoba dan untuk memberikan ilmu kepada peserta mengenai narkoba sejak sekarang.

Kegiatan kedua yang dilakukan lomba membuat slogan mengenai narkoba di sekolah, bertujuan untuk menyampaikan informasi dan memotivasi agar tidak menggunakan narkoba. Kegiatan selanjutnya secara rutin SANTINA melakukan diskusi bersama anggota satgas anti narkoba lainnya agar mengetahui seberapa jauh mengenai narkoba dan berbagi pengalaman yang pernah didapatkan. Kegiatan selanjutnya yaitu kampanye anti narkoba melalui media sosial disini SANTINA

memanfaatkan media sosial untuk menarik masyarakat untuk mendapatkan informasi terupdate tentang narkoba.

d. MAN 3 Sleman

Informan: Ibu Mutmmainah, Pembimbing AKANAMO (Aktivis Anti Narkoba Mayoga)

Rencana aksi atau kegiatan mengenai P4GN yang baru dilakukan AKANAMO yaitu sosialisasi mengenai narkoba di setiap kegiatan event yang ada disekolah apalagi di MAN 3 Sleman ini banyak event yang dilakukan sehingga bisa diselipkan materi narkoba karena AKANAMO belum berdiri sendiri dan masih dibawah OSIS sehingga kegiatan masih dibawah kontrol OSIS.

Kegiatan pertama yang dilakukan AKANAMO yaitu Sosialisasi Anti Narkoba kepada Warga Sekolah, disini mereka melakukan kegiatan diawal semester baru. Pada sosialisasi kali ini AKANAMO menyediakan materi yang disampaikan salah satu penggiat di AKANAMO dan juga memutar video-video agar tidak bosan hanya dengan materi saja dan disini juga menyediakan sesi tanya jawab, materi yang digunakan pun masih seputaran bahaya penyalahgunaan narkoba dan untuk memberikan ilmu kepada peserta mengenai narkoba sejak sekarang.

AKANAMO juga melakukan kegiatan Kampanye Anti Narkoba melalui Aksi Jalan Sehat, disini kegiatan dilakukan bersama warga sekolah namun untuk masyarakat umum juga boleh mengikuti

kegiatan ini. Disini AKANAMO memberikan strategi jalan sehat sabil menyuarakan gerakan anti narkoba selama kegiatan berlangsung, kegiatan ini biasa dilakukan ketika acara hari besar nasional dan dengan kegiatan ini AKANAMO berharap pesan yang ingin mereka sampaikan bisa diterima dengan cara Sehat Tanpa Narkoba.

Kegiatan selanjutnya yang dilakukan AKANAMO adalah Lomba tentang Narkoba seperti LCC, Debat, Puisi, Pidato, Poster dan Mural. Disini AKANAMO bertujuan untuk mengajak siswa menyalurkan potensi-potensi kreatif mereka untuk memberikan solusi yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba.

Dari 4 informan yang peneliti wawancara rata-rata sudah bisa melakukan rencana aksi secara mandiri untuk belajar menjadi penggiat anti narkoba. Untuk beberapa kegiatan lengkap Satuan Tugas Anti Narkoba yang dilakukan pada tahun 2017 ini, peneliti mewawancarai yaitu 2 sekolah (MAN 2 Sleman dan MAN 3 Sleman) dan 2 perguruan tinggi (Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto dan Universitas Teknologi Yogyakarta), kegiatan yang telah mereka lakukan lebih detailnya akan peneliti lampirkan di dalam lampiran skripsi ini untuk rangkaian kegiatan Program Pemberdayaan Penggiat Anti Narkoba di Lingkungan Pendidikan ini.

Gambar 3.6 Foto kegiatan Supervisi Hasil Implementasi Kebijakan P4GN di Lingkungan Pendidikan Tahap 1 di Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto (STTA)



(Sumber: Dokumen Pribadi BNNP DIY)

Gambar 3.7 Foto kegiatan Supervisi Hasil Implementasi Kebijakan P4GN di di Lingkungan Pendidikan Tahap 1 di Universitas Teknologi Yogyakarta



(Sumber: Dokumen Pribadi BNNP DIY)

Gambar 3.8 Foto kegiatan Supervisi Hasil Implementasi Kebijakan P4GN di di Lingkungan Pendidikan Tahap 1 di MAN 2 Sleman



(Sumber: Dokumen Pribadi BNNP DIY)

Gambar 3.9 Foto kegiatan Supervisi Hasil Implementasi Kebijakan P4GN di di Lingkungan Pendidikan Tahap 1 di MAN 3 Sleman



(Sumber: Dokumen Pribadi BNNP DIY)

3. Evaluasi dan Monitoring Pemasaran Sosial Program Pemberdayaan Penggiat Anti Narkoba di Lingkungan Pendidikan

Pada tahap ini BNNP DIY melakukan kegiatan evaluasi dan monitoring dengan cara mengunjungi 6 sekolah dan 9 perguruan tinggi untuk melihat apakah action plan yang sudah direncanakan sudah berjalan atau belum, evaluasi dan monitoring ini dilakukan pada 27 November sampai 7 Desember 2017. Dari action plan tersebut bisa dilihat bagaimana indikator keberhasilan di setiap sekolah dan perguruan tinggi itu sudah berhasilkah dalam Program Pemberdayaan Penggiat Anti Narkoba ini.

Gambar 3.10 Kegiatan Evaluasi di STTA



(Sumber: Dokumen Pribadi BNNP DIY)

Gambar 3.11 Kegiatan Evaluasi di SMA Angkasa Adisutjipto



(Sumber: Dokumen Pribadi BNNP DIY)

Gambar 3.12 Kegiatan Evaluasi di STMIK Akakom



(Sumber: Dokumen Pribadi BNNP DIY)

Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi BNNP DIY menggunakan angket dan kuesioner yang dibagikan kepada setiap sekolah dan perguruan tinggi sebelum nantinya BNNP DIY mengunjungi sekolah dan perguruan

tinggi tersebut. Sehingga ketika BNNP DIY mengunjungi sekolah dan perguruan tinggi tersebut melihat terlebih dahulu angket yang telah dibagikan dan setelah itu baru menanyakan langsung rencana aksi yang telah dilakukan, hambatan apa saja yang di dapat selama pelaksanaan sesuai dengan angket yang telah diisi oleh pihak sekolah dan perguruan tinggi. Angket lengkap yang digunakan oleh BNNP DIY peneliti melampirkan di halaman lampiran untuk lebih jelasnya.

Disini BNNP DIY memiliki indikator keberhasilan sendiri untuk melihat apakah sudah berhasil atau belum kegiatan ini pada pihak masing-masing sekolah dan kampus tersebut, indikator keberhasilan ini peneliti dapatkan dari dokumen BNNP DIY pada laporan Supervisi Hasil Implementasi Kebijakan P4GN di Lingkungan Pendidikan Tahap 2 mengenai evaluasi dan monitoring, yaitu:

- a. Minimal 10 dari 15 instansi pendidikan yang diundang membentuk satuan tugas anti narkoba di lingkungan pendidikan. Setelah hasil evaluasi dan monitoring di sekolah dan perguruan tinggi, 12 diantaranya telah membentuk Satuan Tugas Anti Narkoba.
- b. Minimal 50% terciptanya aturan/kebijakan tentang P4GN yang berlaku bagi seluruh warga sekolah maupun perguruan tinggi. Setelah hasil evaluasi dan monitoring di sekolah dan perguruan tinggi hampir 90% telah membuat kebijakan.
- c. Instansi Pendidikan yang telah ditunjuk mampu melaksanakan kegiatan P4GN secara mandiri. Setelah hasil evaluasi dan monitoring di sekolah

dan perguruan tinggi, hampir seluruh instansi pendidikan tersebut telah melakukan kegiatan P4GN secara mandiri.

- d. Adanya media komunikasi yang mengkampanyekan gerakan anti narkoba. Setelah hasil evaluasi dan monitoring di sekolah dan perguruan tinggi, 50% instansi pendidikan telah membuat media komunikasi seperti media sosial untuk gerakan anti narkoba.

B. Analisis Data

Setelah penyajian data selanjutnya yaitu analisis data, analisis data ini digunakan untuk menganalisis data yang ada di lapangan dengan kajian pustaka yang digunakan di Bab 1. Analisis data ini melihat aktivitas Program Pemberdayaan Penggiat Anti Narkoba di Lingkungan Pendidikan ini, nantinya peneliti akan membahas dan menganalisis data-data yang telah disajikan.

1. Analisis Perencanaan Pemasaran Sosial Badan Narkotika Nasional DIY pada Program Pemberdayaan Penggiat Anti Narkoba

Dalam perencanaan BNNP DIY melakukan strategi secara struktural dengan menggunakan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba apalagi sesuai dengan data yang menunjukkan D.I.Yogyakarta menempati peringkat pertama dalam pengguna coba-coba pakai narkoba pada tingkat remaja sehingga perlunya program pemberdayaan penggiat anti narkoba di lingkungan pendidikan untuk mengurangi angka prevalensi pengguna narkoba coba pakai pada tingkat remaja.

Menurut Kotler dan Roberto (1989 : 39 – 47) dalam bukunya *Social Marketing for Changing Public Behavior*, Tahapan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi monitoring pemasaran sosial adalah yang pertama Analisis Situasi. Sesuai dengan aturan perencanaan pembuatan program yaitu pertama adalah analisis lingkungan, salah satunya menggunakan analisis SWOT. Hanya saja dalam menganalisis lingkungan itu sendiri BNNP DIY tidak menggunakan analisis SWOT jadi peneliti mencoba mencocokkan data yang ada di lapangan dengan analisis SWOT, untuk menganalisis lingkungan BNNP DIY menggunakan data-data yang ditemukan dilapangan mengenai penyalahgunaan narkoba dan mempertimbangkan kemungkinan yang akan terjadi. Untuk hal ini BNNP DIY seharusnya mengambil tindakan analisis secara lebih terstruktur lagi bukan hanya melihat data yang sudah ada saja apalagi jika program ini untuk jangka panjang sehingga dalam menargetkan sasaran akan lebih efektif dan tepat. Apalagi kasus penyalahgunaan narkoba bukan lah hal yang mudah diatasi dalam ruang lingkup masyarakat, karena semakin banyak cara yang bisa dilakukan oleh pengedar narkoba untuk menargetkan sasaran mereka dengan mudah.

Menurut Venus (2004 :124) khalayak terdiri dari kelompok-kelompok atau sub-sub kelompok yang disamping memiliki sejumlah kesamaan sekaligus juga memiliki keragaman baik dari segmen geografis, demografis maupun psikografis. Sesuai dengan Venus dalam menentuka khalayak sasaran BNNP DIY menggunakan segmen geografis, demografis

dan psikografis. Dalam hal segmen geografis BNNP DIY menargetkan lebih ke wilayah Kecamatan Depok, Sleman untuk ini menurut peneliti sudah tepat karena sesuai data memang Kecamatan Depok termasuk wilayah Sleman yang mana tingkat kriminalitas disana termasuk tertinggi dan juga Kecamatan Depok merupakan paling banyak terdapat sekolah dan perguruan tinggi di antara wilayah Yogyakarta lainnya dan juga wilayah ini terdekat dengan objek-objek perlintasan masyarakat seperti Bandara, Perhotelan, Pusat Perbelanjaan dan lainnya. Segmen demografis BNNP DIY menargetkan ke lingkungan pendidikan karena sesuai data penyalahgunaan narkoba tingkat pelajar dan mahasiswa Yogyakarta menempati tingkat pertama dalam pengguna coba pakai. Yang terakhir adalah segmen psikografis sesuai dengan demografis yang menargetkan lingkungan pendidikan pada tingkat pelajar dan mahasiswa, BNNP DIY melihat pola perilaku generasi muda sekarang yang begitu cepat dan mudah terprovokasi sehingga sifat enerjik itu bisa dengan mudah terpengaruh.

Dalam mengkategorikan target sasaran tersebut menurut peneliti ini sudah tepat karena BNNP DIY memang menargetkan secara segmen yang ditemukan di lapangan sehingga dalam menargetkan sasaran untuk program pemberdayaan penggiat anti narkoba di lingkungan pendidikan ini lebih terstruktur dan sistematis meskipun dalam menganalisis BNNP DIY belum secara maksimal.

Konsep mutakhir dalam *Social Marketing* menyatakan tugas organisasi atau perusahaan adalah memadukan elemen-elemen pemasaran murni (*marketing mix: product, price, place, and promotion*) ke dalam bentuk falsafah atau budaya perusahaan (*corporate culture*) serta kepeduliannya terhadap lingkungan hidup dan nilai-nilai kemasyarakatan. Sehingga pemasaran sosial itu sendiri harus diterapkan di lingkungan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan, mengurangi dampak kerusakan kualitas lingkungan hidup dan perlindungan dan keamanan masyarakat konsumen (Ruslan, 2016:267-268).

Seperti yang dijelaskan diatas dalam konsep pemasaran sosial menggunakan konsep dari pemasaran murni pada umumnya yang biasa dikenal dengan *marketing mix* atau yang biasa disebut 4P yaitu *product* (produk), *price* (harga), *promotion* (promosi) dan *place* (tempat). 4P yang menjadi konsep dalam pemasaran murni digunakan juga dalam pemasaran sosial, akan tetapi dalam pemasaran sosial terdapat tambahan 2P yaitu *partnership* (kemitraan) dan *policy* (kebijakan).

Sesuai dengan penjelasan diatas, selanjutnya yaitu dalam merancang program pemasaran sosial sesuai dengan teorinya menggunakan bauran pemasaran yaitu 4P+2P (*Product, Price, Place, Promotion, Partnership and Policy*). Dalam hal ini BNNP DIY menargetkan Program Pemberdayaan Penggiat Anti Narkoba tidak menggunakan konsep bauran pemasaran sosial namun program tersebut tergolong kedalam pemasaran sosial. Menurut *Kotler and Gerald Zaltman*

(1971) dalam buku Ruslan 1998 menjelaskan suatu penerapan dari konsep pemasaran sosial pada aktivitas non komersial yang berhubungan dengan kepedulian kemasyarakatan, kesejahteraan rakyat dan pelayanan sosial.

Untuk produk sendiri BNNP DIY menggunakan “Stop Narkoba”, sesuai dengan kebijakan dari BNN pusat dan menurut peneliti sudah tepat karena target produk untuk masyarakat zaman sekarang, yang mana masyarakat sekarang menginginkan hal yang mudah diingat dan punya keunikan sendiri.

Untuk harga (*price*), dalam pemasaran sosial sendiri harga bisa sama dengan waktu sesuai konsepnya dalam program pemberdayaan penggiat anti narkoba ini butuh meluangkan waktu dan inisiatif dari diri sendiri untuk ikut dalam mensosialisasikan atau mengkampanyekan gerakan anti narkoba ini karena untuk mendapatkan nilai kepedulian dalam suatu program butuh waktu yang panjang agar bisa terealisasi dengan baik. Untuk tempat (*place*) sesuai dengan yang telah ditargetkan BNNP DIY yaitu lingkungan pendidikan. Selanjutnya yaitu promosi, dalam hal ini BNNP DIY tidak banyak menggunakan media promosi dalam melakukan program pemasaran sosial ini, padahal program ini merupakan hal yang menarik untuk diterapkan dan kegiatannya sangat bagus untuk generasi muda sekarang apalagi ini merupakan kegiatan yang positif untuk anak muda sekarang. Menurut peneliti sendiri BNNP DIY harus lebih meningkatkan lebih lagi dalam kegiatan promosi ini karena merupakan hal yang sangat berguna dan penting apalagi pada kasus

narkoba itu sendiri dan juga media promosi saat ini sangat banyak apalagi generasi muda sekarang selalu *update* mengenai hal yang baru.

Selanjutnya yaitu kemitraan (*partnership*) dan kebijakan (*policy*), untuk kemitraan sudah jelas BNNP DIY melakukan kordinasi dengan yang menyangkut kepada pendidikan dan itu sudah tepat, namun ada baiknya juga BNNP DIY menjalin kerjasama kepada media juga sehingga kegiatan ini bisa menjadi salah satu program yang bisa menjadi *trending* dan bukan hanya generasi muda tapi masyarakat pun juga bisa ikut secara mandiri dalam kegiatan penggiat anti narkoba. Untuk kebijakan sendiri menurut peneliti BNNP DIY sudah menggunakan kebijakan yang diatur oleh Peraturan Daerah Yogyakarta dengan tepat dan menjalankan sesuai amanat yang ada di Perda DIY No. 13 tahun 2010.

Setelah menganalisis perencanaan program adalah perencanaan kegiatan yang akan dilakukan BNNP DIY, yang mana pertama BNNP DIY melakukan rapat konsolidasi kemandirian lembaga pendidikan bidang P4GN. Pada rapat ini diskusi antara peserta rapat yaitu untuk membahas rangkaian kegiatan di lingkungan pendidikan, menentukan sasaran peserta, serta membahas kebijakan yang bisa diimplementasikan di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi dan hasil dari rapat ini terpilih 15 sekolah dan 25 perguruan tinggi. Pada kegiatan rapat ini BNNP DIY melakukan hal yang tepat karena BNNP DIY menentukan sekolah dan perguruan tinggi tidak hanya menentukan sendiri tapi mendiskusikan bersama untuk benar-benar menentukan target sekolah dan perguruan tinggi yang mana

saja yang tepat untuk ikut dalam Program Pemberdayaan Penggiat Anti Narkoba ini sehingga nanti kegiatan selanjutnya akan tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Selanjutnya dalam menentukan target sasaran yang nanti akan dituju BNNP DIY melakukan kegiatan rapat lanjutan dari pertama yang mana untuk lebih jelas menentukan sekolah dan perguruan tinggi mana yang tingkat kerawannya mengkhawatirkan maka dilanjutkan dengan Rapat Kerja Pengembangan Kebijakan P4GN di Lingkungan Pendidikan. Untuk hal ini BNNP DIY melakukan seleksi terhadap sekolah dan perguruan tinggi dengan cara menyebarkan kuesioner yang akan diseleksi menjadi 15 instansi pendidikan yang tingkat kerawannya cukup tinggi dan kesiapan sekolah atau perguruan tinggi dalam mengikuti kegiatan ini. Menurut peneliti BNNP DIY tidak hanya menyeleksi dengan kuesioner tapi juga dengan hal yang lain seperti menganalisis lingkungan kembali sehingga 15 instansi pendidikan yang terpilih tersebut sudah tepat nantinya dalam mengimplementasikan program pemasaran sosial tersebut.

2. Analisis Implementasi Program Pemasaran Sosial Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY pada Lingkungan Pendidikan

Ada beberapa rangkaian kegiatan Pemberdayaan Penggiat Anti Narkoba di Lingkungan Pendidikan yang dilakukan BNNP DIY yaitu Pembinaan Fasilitator Pendidikan tentang Kebijakan P4GN di Bidang

Pendidikan, Pelatihan Penggiat Anti Narkoba di Lingkungan Pendidikan dan Supervisi Hasil Implementasi Kebijakan di Bidang Pendidikan.

Menurut Kotler dan Roberto (1989 : 39 – 47) dalam bukunya *Social Marketing for Changing Public Behavior*, dalam pelaksanaan pemasaran sosial adalah implementasi program. Dalam implementasi program pemasaran, setiap elemen 6P (*Product, Price, Place, Promotion, Partnership and Policy*) dalam *marketing mix* akan diintegrasikan dengan penentuan tujuan program, pemilihan pesan dan media yang digunakan. Implementasi pemasaran merupakan tahap dimana pelaku pemasaran melakukan realisasi terhadap rancana–rencana pemasaran dengan melibatkan pihak–pihak yang sudah dipilih untuk bekerja sama. Bersamaan dengan itu, pelaku pemasaran juga sudah mengetahui kapan, dimana dan bagaimana program pemasaran akan dijalankan.

Dalam rangkaian tersebut sesuai dengan program yang direncanakan BNNP DIY sejak awal, kegiatan pertama yaitu pembinaan fasilitator pendidikan tentang kebijakan P4GN disini maksud BNNP DIY melatih para guru atau dosen yang akan menjadi fasilitator penggiat anti narkoba dan pembimbing satgas anti narkoba di lingkungan pendidikan. Menurut peneliti ini sudah tepat karena dalam melakukan kegiatan pertama ini BNNP DIY ingin memberikan pengetahuan dan informasi kepada pemangku kebijakan di sekolah ataupun perguruan tinggi sehingga sewaktu pelaksanaan di lapangan antara guru atau dosen dengan siswa atau mahasiswa bisa berkerjasama dengan baik.

Selanjutnya yaitu pelatihan penggiat anti narkoba, ini merupakan inti dari program pemberdayaan penggiat anti narkoba ini karena target sasaran BNNP DIY adalah pelajar dan mahasiswa. Disini siswa dan mahasiswa di beri informasi mengenai narkoba, jenisnya dan lain-lain, selanjutnya mereka di beri bekal mengenai *public speaking* jadi siswa dan mahasiswa nanti secara mandiri dapat menjadi penggiat anti narkoba di lingkungan mereka. Disini juga mereka di beri informasi dan cara bagaimana membentuk Satuan Tugas Anti Narkoba, sehingga setelah terbentuknya Satuan Tugas Anti Narkoba nanti mereka dapat secara mandiri melaksanakan kebijakan P4GN. Menurut peneliti dalam segi pengetahuan dan informasi yang diberikan kepada siswa dan mahasiswa yang ikut dalam kegiatan pelatihan penggiat anti narkoba itu sendiri sudah tepat, namun menurut peneliti seharusnya BNNP DIY tidak hanya melakukan pelatihan dengan materi saja tapi harus ada simulasi, walaupun simulasi hanya *public speaking* saja yang dilakukan di kegiatan tersebut tapi seharusnya di setiap materi tersebut ada simulasi jadi peserta yang mengikuti tidak akan bosan dengan materi saja.

Setelah itu BNNP DIY melakukan Supervisi Hasil Implementasi Kebijakan di Bidang Pendidikan disini BNNP DIY mengunjungi langsung 15 instansi pendidikan tersebut untuk melihat perencanaan kegiatan yang dilakukan setelah 2 rangkaian kegiatan tersebut dan melihat apakah sudah ada kegiatan yang telah dilakukan mengenai P4GN ataupun Satuan Tugas Anti Narkoba.

Diantara 3 kegiatan implementasi program pemberdayaan penggiat anti narkoba di lingkungan pendidikan yang lebih menuju ke Strategi Pemasaran Sosial adalah Pelatihan Penggiat Anti Narkoba di Lingkungan Pendidikan yang mana mengundang siswa dan mahasiswa untuk dilatih menjadi penggiat anti narkoba dan juga nantinya bisa membentuk satuan tugas anti narkoba. Kenapa peneliti memilih kegiatan tersebut menjadi fokus utama BNNP DIY dalam program pemberdayaan penggiat anti narkoba, yang pertama melihat dari sasaran program ini lebih ke pelajar dan mahasiswa, yang kedua kegiatan pelatihan penggiat anti narkoba ini lebih menunjukkan pemasaran sosial dari bauran pemasaran sosial yaitu 6P tersebut, disini dalam kegiatan ini 6P lebih banyak ditonjolkan seperti produk yang di tawarkan, harga atau dalam pemasaran sosial bisa juga disamakan dengan waktu yang mana generasi muda sekarang sangat aktif dalam kegiatan positif seperti gerakan anti narkoba ini dan juga promosi, meskipun BNNP DIY tidak menggunakan promosi terlalu banyak tapi disini memanfaatkan generasi muda untuk menyampaikan aspirasi mereka melalui yang sudah canggih seperti sekarang yaitu salah satunya media sosial, disini mereka bisa mempromosikan dengan media sosial mereka masing-masing. Yang ketiga menurut peneliti ini merupakan inti dari segala rangkaian program pemberdayaan penggiat anti narkoba BNNP DIY, karena sesuai dengan segmen yang telah ditentukan oleh BNNP DIY sejak awal.

Kekurangan dari implementasi program pemberdayaan penggiat anti narkoba ini khususnya di kegiatan pelatihan penggiat anti narkoba yaitu materi yang diberikan kepada pelajar dan mahasiswa kurang menarik dan sedikitnya simulasi untuk kegiatan ini.

3. Analisis Evaluasi dan Monitoring Pemasaran Sosial Program Pemberdayaan Penggiat Anti Narkoba di Lingkungan Pendidikan

Dalam Program Pemberdayaan Penggiat Anti Narkoba ini BNNP DIY melakukan evaluasi dan monitoring kegiatan dengan cara mengunjungi sekolah dan perguruan tinggi masing-masing sebanyak 2 kali ketika selesainya kegiatan tersebut setelah itu sekolah maupun perguruan tinggi bergerak sendiri. Menurut peneliti ini dalam evaluasi dan monitoring setelah kegiatan sudah cukup tepat karena ini untuk mencapai indikator keberhasilan yang ditargetkan BNNP DIY sejak awal terbuatnya program ini. Sehingga dalam kegiatan ini dikatakan berhasil jika rata-rata indikator keberhasilan sudah tercapai. Namun evaluasi dan monitoring memang dikatakan rata-rata sudah tercapai untuk kegiatan program itu sendiri tapi menurut peneliti dalam kegiatan evaluasi dan monitoring tidak hanya bisa dilakukan 2 kali saja setelah kegiatan tersebut apalagi Program Pemberdayaan Penggiat Anti Narkoba ini bertujuan untuk program jangka panjang yang mana salah satu indikator yang diinginkan BNNP DIY adalah setiap sekolah dan perguruan tinggi sudah memiliki Satuan Tugas Anti Narkoba. Seharusnya setelah terbentuk Satgas Anti Narkoba dari

Program Pemberdayaan Penggiat Anti Narkoba ini BNNP DIY melakukan evaluasi dan monitoring kembali setidaknya 1 bulan sekali untuk mengecek rencana aksi atau kegiatan yang telah direncanakan tersebut sudah berjalan dengan baik atau tidak dan hambatan-hambatan apa saja yang mereka hadapi saat menjalankan sebagai Satgas Anti Narkoba.

Dalam bentuk monitoring dan evaluasi yang BNNP DIY gunakan menurut peneliti sudah tepat karena BNNP DIY menggunakan sebuah angket dan kuesioner yang di bagikan di setiap peserta penggiat anti narkoba yaitu sekolah dan perguruan tinggi. Karena didalam angket dan kuesioner tersebut dijelaskan secara rinci apa saja kegiatan yang dilakukan, bagaimana pelaksanaannya, dan apa saja hambatan yang di temukan. Sehingga untuk bentuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan sudah cukup untuk mengetahui kegiatan pemberdayaan penggiat anti narkoba tersebut. Meskipun bentuk monitoring dan evaluasinya sudah tepat namun untuk waktu ada baiknya BNNP DIY melakukan rutin sehingga program yang terlaksana bisa dilihat apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak apalagi khususnya yang Satuan Tugas Anti Narkoba yang baru terbentuk belum banyak bisa melakukan kegiatan secara mandiri.

Menurut *Kotler & Roberto*, 1989:17, didalam pemasaran sosial ada beberapa elemen yang bisa menjadi pengukur untuk keberhasilan atau kegagalan. Berikut beberapa elemen yang dapat dijadikan tolak ukur

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pemasaran sosial dalam suatu kampanye *public relations*:

- a. *Cause* yaitu sasaran sosial, sasaran sosial itu sendiri merupakan masyarakat Yogyakarta terutama kepada pemangku instansi pendidikan, pelajar dan mahasiswa yang dapat mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba di Yogyakarta ini sehingga bisa mengurangi angka prevalensi penyalahgunaan narkoba pada tingkat pelajar dan mahasiswa.

Dalam hal ini BNNP DIY melakukan sasaran sesuai data yang telah mereka temukan di lapangan sehingga menurut peneliti ini sudah sistematis.

- b. *Change agent*, yaitu kelompok yang mencoba mengadakan suatu perubahan sosial dengan melancarkan suatu kampanye perubahan sosial adalah Penggiat Anti Narkoba itu sendiri yang mana bisa mengkampanyekan dan ikut melakukan gerakan anti narkoba.
- c. *Target adopters* (target sasaran) dalam program pemasaran sosial ini lebih kepada pelajar dan mahasiswa.
- d. Untuk *Channels* BNNP DIY memilih dengan pertemuan langsung sehingga target sasaran lebih memahami mengenai program pemberdayaan penggiat anti narkoba ini
- e. Dalam strategi yang dilakukan ini BNNP DIY menargetkan terbentuknya Satuan Tugas Anti Narkoba di lingkungan pendidikan dan

sekolah atau perguruan tinggi sudah menciptakan kebijakan atau peraturan mengenai P4GN di lingkungan mereka.

Dalam mengukur elemen yang menjadi pengukur strategi pemasaran sosial dalam program pemberdayaan penggiat anti narkoba yang dilakukan BNNP DIY tidak bisa hanya melihat dalam jangka waktu sebentar saja karena ini merupakan program yang tujuannya untuk jangka panjang namun dalam indikator keberhasilan yang telah dicapai BNNP DIY dalam program ini sudah bisa dikatakan ini berhasil dari data yang peneliti dapatkan di lapangan tersebut, walaupun dalam strategi pemasaran sosial yang dilakukan ada beberapa poin yang belum dilakukan secara maksimal ini bisa menjadi bahan evaluasi kembali untuk BNNP DIY agar bisa memperbaiki kembali untuk kegiatan selanjutnya.